

**MANAJEMEN RESIKO
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

2022

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)														SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
a	b	c														d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA		KURANG MEMADAI														
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	1	2	2	2	1	3	2	4	2	2	1	2	3	2	KURANG MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	4	3	2	4	3	2	3	3	4	2	3	3	3	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	2	3	3	4	3	2	2	2	2	3	2	2	KURANG MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	4	2	3	2	KURANG MEMADAI
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI		KURANG MEMADAI														
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	2	4	3	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	KURANG MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	KURANG MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	3	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	KURANG MEMADAI
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF		MEMADAI														
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	4	2	3	4	3	2	2	3	3	4	2	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	2	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	4	2	KURANG MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	2	2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	4	2	KURANG MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	1	3	1	1	2	3	4	2	1	3	1	2	1	KURANG MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	2	4	4	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3	4	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	KURANG MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	2	2	3	MEMADAI
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN		MEMADAI														
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	2	2	2	2	3	4	4	4	3	3	3	2	KURANG MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	2	2	2	3	2	2	1	2	3	2	KURANG MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	MEMADAI

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Pasaman Barat

Nama Penda : Dinas Perhubungan		Tahun Penilaian : 2022	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	DISHUB	kurangnya peraturan di bidang teknis perhubungan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	DISHUB	minimnya SDM di bidang Perhubungan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	DISHUB	SOP yang tidak dilaksanakan sesuai dokumen	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
4	DISHUB	Pembagian Wewenang yang kurang tepat	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
5	DISHUB	Kurangnya Skala prioritas dalam pengambilan kebijakan	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
6	DISHUB	Hubungan dengan instansi vertikal yang kurang harmonis	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
7	DISHUB	Kurangnya SDM teknis yang ada di inspektorat	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
8	DISHUB	anggaran yang tidak memadai untuk pengembangan kompetensi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
9	DISHUB	Pejabat yang kurang memahami Tupoksi kerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
10	DISHUB	Pejabat yang tidak memiliki pengetahuan teknis dan kompetensi	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

*1) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Pasaman Barat

Nama Pemda : Dinas Perhubungan		Tahun Penilaian : 2022	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	DISHUB	kurangnya peraturan di bidang teknis perhubungan	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	DISHUB	minimnya SDM di bidang Perhubungan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	DISHUB	SOP yang tidak dilaksanakan sesuai dokumen	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
4	DISHUB	Pembagian Wewenang yang kurang tepat	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
5	DISHUB	Kurangnya Skala prioritas dalam pengambilan kebijakan	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
6	DISHUB	Hubungan dengan Instansi vertikal yang kurang harmonis	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
7	DISHUB	Kurangnya SDM teknis yang ada di inspektorat	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
8	DISHUB	anggaran yang tidak memadai untuk pengembangan kompetensi	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
9	DISHUB	Pejabat yang kurang memahami Tupoksi kerja	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
10	DISHUB	Pejabat yang tidak memiliki pengetahuan teknis dan kompetensi	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten pasaman Barat

Nama Pemda		pasaman barat					
Tahun Penilaian		2022					
No.	Sub unsur	Hasil Reriu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	KURANG MEMADAI	kurangnya peraturan di bidang teknis perhubungan	KURANG MEMADAI	kurangnya peraturan di bidang teknis perhubungan	KURANG MEMADAI	kurangnya peraturan di bidang teknis perhubungan
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	minimnya SDM di bidang Perhubungan	KURANG MEMADAI	minimnya SDM di bidang	KURANG MEMADAI	minimnya SDM di bidang Perhubungan
3	Kepemimpinan yang kondusif	KURANG MEMADAI	Pejabat yang kurang memahami Tupoksi kerja	KURANG MEMADAI		KURANG MEMADAI	Pejabat yang kurang memahami Tupoksi kerja
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI		MEMADAI		MEMADAI	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	KURANG MEMADAI	Pembagian Wewenang yang kurang tepat	KURANG MEMADAI	Pembagian Wewenang yang kurang tepat	KURANG MEMADAI	Pembagian Wewenang yang kurang tepat
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI		KURANG MEMADAI	Kurangnya Bimtek yang diselenggarakan dan dilakukan oleh dinas	KURANG MEMADAI	Kurangnya Bimtek yang diselenggarakan dan dilakukan oleh dinas
7	Perwujudan peran APSP yang efektif	MEMADAI		MEMADAI		MEMADAI	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	KURANG MEMADAI	Hubungan dengan Instansi vertikal yang kurang harmonis	MEMADAI		KURANG MEMADAI	Hubungan dengan Instansi vertikal yang kurang harmonis

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pasaman Barat	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Sumber Data	: RPJMD	
Visi	Mewujudkan pasaman barat bermartabat agamais maju dan sejahtera	
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovativ. 2. Mewujudkan masyarakat agamais bebudaya, aman tentram dan tangguh. 3. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya sains.	
Penetapan Konteks Misi Strategis Pemda	3. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya	
Tujuan Strategis RPJMD	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan.	
Sasaran RPJMD	1. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	1. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal.	
IKU Sasaran RPJMD	1. Indeks Gini	
Penetapan Konteks IKU Strategis Pemda	5. PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian. 2. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian . 3. Program Peningkatan detstinasi daya tarik pariwisata. 4. Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi. 5. Program Pengembangan iklim penanaman modal	
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Ekonomi	
Nama Dinas Terkait	DISHUB DPTPHP DISBUN DISKAN DPMN PUPR UMKM DLH DISPAR	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan Sasaran : Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal. IKU : PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) 1. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian. 2. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian . 3. Program Peningkatan detstinasi daya tarik pariwisata. 4. Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi. 5. Program Pengembangan iklim penanaman modal	
	Dst	
		Kabupaten Pasaman Barat , Simpang Empat 2022 Bupati H.HAMSUARDI

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pasaman Barat		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Pilihan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Perhubungan		
Sumber Data	Renstra OPD		
Tujuan Strategis	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengemACbangakan konektifitas wilayah		
Sasaran Strategis	Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan		
IKU Renstra OPD		IKU	2022
	1	Rasio Konektifitas Kabupaten	1,8
	2	Persentase layanan angkutan darat Persen	40 %
	3	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,6
Program	1. Program Lalu Lintas angkutan jalan		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah		
	Dst		
		Kabupaten Pasaman Barat , Simpang Empat 2022 Kepala Dinas Perhubungan  BAKARUDIN SH NIP.196810021992121001	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pasaman Barat		
Tahun Penilaian	2022		
Periode yang dinilai	2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan Pilihan		
OPD yang Dinilai	Dinas Perhubungan		
Sumber Data	Renja OPD		
Tujuan Strategis	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah		
Program Dinas dan Kegiatan Utama	1. Program Lalu Lintas angkutan jalan 2. Program Penerbangan		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	jumlah pju yang di pelihara	30 unit
	2.	jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	30 Unit
	3.	jumlah rehabilitas yang dilaksanakan	2 unit
	4.	jumlah sdm yang kompeten	5 orang
	5.	jumlah peningkatan kapasitas sdm	12 orang
	6.	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 Kartu
	7.	jumlah pemeliharaan alat uji	10 unit
	8.	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait	20 kali
	9.	Jumlah bus dan rute pelayanan antar jemput anak sekolah	11 Bus
	10.	jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	10 kali
	11.	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan bus	11 bus
	12.	jumlah pengawasan kapal	30 kali
	13.	Jumlah Pesawat Lepas Landas	48 Kali
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Lalu Lintas angkutan jalan 2. Program Penerbangan 3. Program pelayaran Kegiatan : 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 9. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 10. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang		
	Kabupaten Pasaman Barat , Simpang Empat 2022 Kepala Dinas Perhubungan  BAKARUDDIN, SH NIP. 196810021992121001		

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pasaman Barat Nama OPD : Dinas Perhubungan Tahun Penilaian : 2022 Periode yang dinilai : 2021-2026 Urusan Pemerintahan : bidang perhubungan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		Dampak		
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
1	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	Bertambahnya Pengangguran		Kepala Daerah	Kurangnya Lapangan Kerja			Usia Kerja tidak mendapatkan Pekerjaan	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/ Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pasaman Barat Nama OPD : Dinas Perhubungan Tahun Penilaian : Pasaman Barat Periode yang dinilai : 2022 Tujuan Strategis : Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah Urusan Pemerintahan														
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pernilik	Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena			
			Uralan	Kode Risiko		Uralan	Sumber		Uralan					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k				
	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	tidak ada pembangunan jalan		Kepala Dinas PU	Kurangnya anggaran untuk pembangunan jalan	Eksternal	UC	tidak bertambah konektivitas antara jalan satu dengan jalan lain	Kepala Dinas Perhubungan, Masyarakat				
	Meningkatnya konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan.	Persentase layanan angkutan darat	Kurangnya masyarakat menggunakan angkutan umum		Kepala dinas Perhubungan	sarana angkutan umum yang kurang memadai,	Internal	C	Masyarakat tidak mau untuk menaiki angkutan umum	Kepala Dinas Perhubungan, Masyarakat				
		V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	Meningkatnya Kemacetan		Kepala Dinas Perhubungan	Banyaknya Minat Masyarakat untuk mempunyai kendaraan bermotor	Internal	C	Kendaraan bermotorbertambah dengan kondisi jalan tetap sama sehingga menyebabkan kemacetan	Kepala Dinas Perhubungan, Masyarakat				

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Kabupaten Pasaman Barat									
Nama OPD : Dinas Perhubungan									
Tahun Penilaian : 2022									
Periode yang dinilai : 2021-2026									
Tujuan Strategis : Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah									
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan konektivitas angkutan umum dan konektivitas jalan.									
Urutan Pemerintahan :									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab	
			Tahap					Uraian	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pju yang di polihara	Perencanaan	Melakukan usulan kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu	Kepala Bidang KTD	Kepala Bidang KTD	Tekanan dari Anggota dpr yang mempunyai POKIR	Internal	C
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dielihara	Pelaksanaan	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMd) tidak mencerminkan kebutuhan riil	Kepala Bidang KTD	Kepala Bidang KTD	Tidak Mempunyai Data Base	Internal	C
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah rehabilitasi yang dilaksanakan	Pelaksanaan	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMd) tidak mencerminkan kebutuhan riil	Kepala UPT Terminal	Kepala UPT Terminal	Tidak Mempunyai Data Base	Internal	C
4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah sdm yang kompeten	Pelaksanaan	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM	Kepala UPT Terminal	Kepala UPT Terminal	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Internal	C
5	Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah peningkatan kapasitas sdm	Pelaksanaan	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM	Kepala UPT KIR	Kepala UPT KIR	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Internal	C
6	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan	Kerusakan pada saat pengiriman kartu bukti lulus uji	Kepala UPT KIR	Kepala UPT KIR	Ekspedisi yang melakukan pengiriman lalai dalam melakukan pengiriman	Internal	C
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	Pelaksanaan	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMd) tidak mencerminkan kebutuhan riil	Kepala UPT KIR	Kepala UPT KIR	Tidak Mempunyai Data Base	Internal	C
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait	Pelaksanaan	Pemeriksaan gagal mendeteksi informasi dari/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan	Kepala UPT KIR	Kepala UPT KIR	Anggota tidak melakukan perjalanan dinas karena kebijakan pimpinan	Internal	C
9	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	Perencanaan	Perjalanan Dinas Fiktif	Kepala Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Internal	C
10	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bus dan rute pelayanan antar jemput anak sekolah	Perencanaan	Perjalanan Dinas Fiktif	Kepala Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ	SPJ fiktif BDM dan Pemeliharaan untuk memperkaya diri	Internal	C

11	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	Perlanggung Jawaban	Perjalanan Dinas Fiktif	Kepala Bidang LLAJ	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Temuan saat pemeriksaan Keuangan	Kepala Bidang LLAJ
12	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Penetrujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan Kapal	Perlanggung Jawaban	Perjalanan Dinas Fiktif	Kepala Bidang LaUt dan Udara	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Temuan saat pemeriksaan Keuangan	Kepala Bidang LaUt dan Udara
13	Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Pesawat Lepas Landas	Perlanggung Jawaban	Perjalanan Dinas Fiktif	Kepala UPT Bandara	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Temuan saat pemeriksaan Keuangan	Kepala UPT Bandara

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Kabupaten Pasaman Barat			
Tahun Penilaian		: 2022			
Tujuan Strategis		: Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah			
Urusan Pemerintahan		:			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
a	b	c	Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Bertambahnya Pengangguran		3	4	12
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Perhubungan					
1	tidak ada pembangunan jalan		2	4	8
2	Kurangnya masyarakat menggunakan angkutan umum		3	4	12
3	Meningkatnya Pertumbuhan Kendaraan Secara signifikan		4	4	16
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Perhubungan					
1	Meloloskan usulan kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu		4	2	8
2	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan)		3	3	9
3	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal)		3	4	12
4	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)		4	4	16
5	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		4	4	16
6	Kerusakan pada saat pengiriman kartu bukti lulus uji		4	1	4
7	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		3	1	3
8	Perjalanan Dinas Fiktif (Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		3	2	6
9	pemeriksaan		4	2	8
10	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		3	2	6
11	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		3	2	6
12	Perjalanan Dinas Fiktif (Bidang Laut Dan Udara)		3	2	6
13	Perjalanan Dinas Fiktif (Bandara)		3	2	6

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dgnan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah
Urusan Pemerintahan	Dinas Perhubungan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Bertambahnya Pengangguran		12	Kepala Daerah	Kurangnya Lapangan Kerja	Usia Kerja tidak mendapatkan Pekerjaan
II	Risiko Strategis OPD Dinas Perhubungan					
1	Tidak ada pembangunan jalan		8	Kepala Dinas Perhubungan	Kurangnya anggaran untuk pembangunan jalan	tidak bertambah konektivitas antara jalan satu dengan jalan lain
2	Kurangnya masyarakat menggunakan angkutan umum		12	Kepala Dinas Perhubungan	sarana angkutan umum yang kurang memadai	Masyarakat tidak mau untuk menaiki angkutan umum
3	Meningkatnya Kemacetan		16	Kepala Dinas Perhubungan	Banyaknya Minat Masyarakat untuk mempunyai kendaraan bermotor	kendaraan bermotor bertambah dengan kondisi jalan tetap sama sehingga menyebabkan kemacetan
III	Risiko Operasional OPD Dinas Perhubungan					
1	Meloloskan usulan kegiatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu		8	Kepala Bidang KTD	Tekanan dari Anggota dpr yang mempunyai POKIR	Tidak Sesuai Pengadaan dan dapat menjadi Temuan pemeriksaan Keuangan
2	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan)		9	Kepala Bidang KTD	Tidak Mempunyai Data Base	Pemeliharaan tidak tepat Sasaran
3	Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal)		12	Kepala UPT Terminal	Tidak Mempunyai Data Base	Pemeliharaan tidak tepat Sasaran
4	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)		16	Kepala UPT Terminal	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Pelayanan Kurang Maksimal
5	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		16	Kepala UPT KIR	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Pelayanan Kurang Maksimal
6	Perjalanan Dinas Fiktif (Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		6	Kepala UPT KIR	Anggota tidak melakukan perjalanan dinas karena kebijakan pimpinan	Temuan saat pemeriksaan Keuangan
7	Pemeriksa gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan		8	Kepala Bidang LLAJ	Kurangnya SDM Teknis Perhubungan	Pelayanan Kurang Maksimal
8	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		6	Kepala Bidang LLAJ	SPJ fiktif BBM dan Pemeliharaan untuk memperkaya diri	Temuan saat pemeriksaan Keuangan
9	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		6	Kepala Bidang LLAJ	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Temuan saat pemeriksaan Keuangan
10	Perjalanan Dinas Fiktif (Bidang Laut Dan Udara)		6	Kepala Bidang LaUt dan Udara	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Temuan saat pemeriksaan Keuangan
11	Perjalanan Dinas Fiktif (Bandara)		6	Kepala UPT Bandara	SPJ fiktif Pengamanan dan pelaksanaan kegiatan	Temuan saat pemeriksaan Keuangan

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Kabupaten Pasaman Barat					
Tahun Penilaian		: 2022					
Tujuan Strategis		: Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektivitas wilayah					
Urusan Pemerintahan		: Dinas Perhubungan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Bertambahnya Pengangguran		Ekspo Lapangan kerja	Kebijakan Tenaga kerja lokal untuk perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat	Menerapkan Aturan persentase pekerja lokal	Kepala daerah	Triwulan IV 2023
II Risiko Strategis Dinas Perhubungan							
1	Kurangnya masyarakat menggunakan angkutan umum		BUS gratis untuk anak sekolah	Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya	Subsidi Gratis Angkutan Umum	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan 1 2023
2	Meningkatnya Kemacetan		Pengaturan Lalu lintas di jalan	Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya	Manajemen Lalu Lintas	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan 1 2023
III Risiko Operasional Dinas							
1	Melakukan urusan kegiatan yang membutuhkan pihak-pihak tertentu		POKJA melalui ULP	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	Membuat tim teknis	Kepala Bidang KTD	Triwulan III 2022
2	Defisit Kebutuhan Barang Milik Daerah (DABMD) dan Defisit Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DAPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan)		Membuat RKBMD	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	Survey database pemeliharaan	Kepala Bidang KTD	Triwulan IV 2022
3	Defisit Kebutuhan Barang Milik Daerah (DABMD) dan Defisit Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DAPBMD) tidak mencerminkan kebutuhan riil (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal)		Membuat RKBMD	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	Survey database pemeliharaan	Kepala UPT Terminal	Triwulan IV 2022
4	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)		Apel Pagi/Absen	Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya	PKS dan MOU dengan Sekolah kedinasan	Kepala UPT Terminal	Triwulan III 2022
5	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM (Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		Apel Pagi/Absen	Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya	PKS dan MOU dengan Sekolah kedinasan	Kepala UPT KIR	Triwulan III 2022
6	Perjalanan Dinas Fiktif (Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)		DPA,Standart Biaya	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Kepala UPT KIR	Triwulan III 2022
7	Pemeriksaan gagal mendeteksi informasi dan/atau permasalahan yang terkait dengan tujuan pemeriksaan		SDM Kelistrikan dan SOP perbaikan APILL	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Bimtek dan uji kompetensi di bidang terkait	Kepala Bidang LLAJ	Triwulan IV 2022
8	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		DPA,Standart Biaya	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Kepala Bidang LLAJ	Triwulan III 2022
9	Perjalanan Dinas Fiktif (LLAJ)		DPA,Standart Biaya	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Kepala Bidang LLAJ	Triwulan III 2022
10	Perjalanan Dinas Fiktif (Bidang Laut Dan Udara)		DPA,Standart Biaya	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Kepala Bidang LaUt dan Udara	Triwulan III 2022
11	Perjalanan Dinas Fiktif (Bandara)		DPA,Standart Biaya	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Kepala UPT Bandara	Triwulan III 2022

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Kabupaten Pasaman Barat : 2022 : Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah : Dinas Perhubungan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Subsidi Gratis Angkutan Umum	Rapat	Dishub,SEKDA	Tim TAPD,Inspektorat,	Triwulan 1 2023	JANUARI 2023	
2	Manajemen Lalu Lintas	Rapat	Dishub	Satlatas polres pasbar	Triwulan 1 2023	JANUARI 2023	
3	Membuat tim teknis	Surat Keputusan	Sekretaris Perhubungan	Pegawai dinas	Triwulan III 2022	AGUSTUS 2022	
4	Survey database pemeliharaan	Survey	Dishub	Staff Dinas Perhubungan	Triwulan IV 2022	November 2022	
5	PKS dan MOU dengan Sekolah kedinasan	Kerja sama	Dishub	BUPATI ,BKPSDM,SEKDA,DISHU B	Triwulan III 2022	AGUSTUS 2022	
6	SOP pembuatan Pertanggung jawaban yang ketat	Surat Keputusan	Sekretaris Perhubungan	Pegawai dinas perhubungan	Triwulan III 2022	AGUSTUS 2022	
7	Bimtek dan uji kompetensi di bidang terkait	Pelatihan	Dishub,BPSDM kementrian Perhu	BKPSDM,DISHUB,Tim TAPD	Triwulan IV 2022	November 2022	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.